**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang Penelitian**

Akuntasi mulai diterapkan di Indonesia sejak tahun 1642. Akan tetapi yang jelas terdapat pada pembukuan Amphioen Societeit yang berdiri di Jakarta sejak 1747. Selanjutnya akuntansi di Indonesia berkembang setelah UU Tanam Paksa dihapuskan pada tahun 1870. Hal ini mengakibatkan munculnya para pengusaha swasta Belanda yang menanamkan modalnya di Indonesia. Namun hingga pada tahun 1928 tak ada satu orang Indonesia pun yang bekerja di bidang akuntansi sebagai akuntan publik.

Pada tanggal 21 September 1929 ialah JD Massie orang Indonesia pertama yang bekerja di bidang akuntansi, yang saat itu diangkat sebagai pemegang buku pada Jawatan Akuntansi Pajak. Kesempatan bagi akuntan lokal muncul pada tahun 1942, dengan mundurnya Belanda dari Indonesia. Praktik akuntansi model Belanda masih digunakan selama era setelah kemerdekaan (1950an). Pendidikan dan pelatihan akuntansi masih didominasi oleh system akuntansi model Belanda.

Pada masa-masa setelah kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana perusahaan-perusahaan Belanda pergi dari Indonesia dan muncul investor baru yang berasal dari Amerika. Para investor Amerika datang memperkenalkan system akuntansi Amerika yang dianggap lebih menggambarkan proses praktis bisnis yang sebenarnya. Terkait hal itu dibentuknya Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) tahun 1957 sebagai wadah profesi akuntan di Indonesia yang berdiri hingga saat ini.

Dunia akuntansi yang kian berkembang tidak hanya membawa pengaruh baik untuk masyarakat, namun juga membawa pengaruh buruk seperti masalah kecurangan (*fraud*) yang semakin merajalela di berbagai sendi kehidupan, baik dalam skala kecil maupun besar. Kecurangan Akuntansi pada umumnya disebabkan oleh dorongan untuk memanfaatkan kesempatan atau dapat pula disebabkan tekanan dari manajemen untuk melakukan penyelewengan secara terstruktur.

Salah saji yang disebabkan kecurangan dalam proses menghasilkan laporan keuangan berarti bahwa proses penghilangan jumlah maupun salah saji dalam laporan keuangan tersebut dilakukan secara sengaja sehingga dapat merugikan para pengguna laporan keuangan. Sementara itu, salah saji akibat perlakuan tidak semestinya dari pihak-pihak yang memiliki kewenangan, dapat pula disebut sebagai penggelapan atau penyalahgunaan. Kasus yang terjadi dapat berupa pencurian aktiva suatu entitas usaha sehingga laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum (PABU) di Indonesia (IAI,2001).

Definisi Kecurangan Akuntansi (*fraud*) menurut Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) (2007) adalah suatu tindakan yang secara sengaja dilakukan meski bertentangan dengan hukum yang berbentuk penipuan pada pihak lain guna memperoleh suatu hasil tertentu. Kecurangan akuntansi dibentuk dalam tiga kategori utama oleh *Association of Certified Fraud Examination* (2014) yaitu kecurangan laporan keuangan (*financial statement fraud*), penyalahgunaan aset (*asset misappropriation*) dan korupsi (*corruption*). Salah satu bentuk kecurangan atau *fraud*  yang sering terjadi di Indonesia adalah korupsi.

Peneliti Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW) Wana Alamsyah mengatakan terdapat 576 kasus korupsi sepanjang 2017. Angka ini bertambah dibandingkan tahun sebelumnya 2016 dengan total 482 kasus (Nasional Tempo, 2018). Wana mengatakan, kerugian negara naik dari Rp 1,5 Triliun pada 2016 menjadi Rp 6,5 Triliun pada 2017. Penyebabnya karena ada pengusutan terhadap kasus korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP dengan jumlah kerugian negara yang besar, yaitu sekitar Rp 2,3 triliun. Menurut Wana, banyaknya kepala daerah terjerat kasus korupsi berkontribusi terhadap jumlah tersangka. Dari sebelumnya hanya 21 tersangka kepala daerah, tahun 2017 bertambah menjadi 30 orang. Hal ini tentu sangat memprihatinkan karena para pemangku jabatan yang seharusnya dapat dipercaya oleh rakyat justru dimanfaatkan jabatannya untuk perbuatan yang salah. Banyaknya kasus yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia ini, menjadi tugas tambahan bagi pemerintah untuk menanggulanginya, mengingat masih kurangnya pendidikan anti korupsi yang seharusnya ditanamkan sejak dini.

Pendidikan merupakan hak bagi setiap orang yang juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, masyarakat juga berharap bahwa dengan pendidikan yang baik, maka korupsi dapat diminimalisir. Namun pada kenyataannya, sektor pendidikan yang seharusnya mengajarkan nilai moral juga tidak luput dari kasus-kasus korupsi yang terjadi selama beberapa tahun terakhir. Deputi Koordinator Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan mengungkap, bahwa institusi pendidikan yang seharusnya bisa menjadi benteng dalam memerangi korupsi justru malah terlibat dalam praktik korupsi. Ade Irawan menyebutkan, mulai dari oknum kepala dinas, anggota DPR/DPRD, pejabat kementrian, guru, kepala sekolah, dosen, rektor pun ikut terseret dalam kasus korupsi, sekitar 214 kasus terjadi di dinas pendidikan (Tribunnews, 2017).

Menurut Arens (2008), ada tiga unsur untuk mencegah *fraud* yang salah satunya dengan menerapkan budaya jujur dan etika yang tinggi. Cara yang paling efektif untuk mencegah dan menghalangi kecurangan adalah dengan mengimplementasikan program serta pengendalian anti kecurangan, yang didasarkan pada nilai-nilai inti yang dianut perusahaan. Menurut Veithzal Rivai dan Deddy Mulyadi (2012) bahwa untuk mendorong pegawai untuk tidak melakukan tindakan *fraud* perusahaan harus melakukan berbagai upaya diantaranya dengan mengadakan seminar, mengadakan lokakarya, mengadakan program latihan, menyediakan konsultan, menciptakan mekanisme perlindungan bagi karyawan *(whistleblower protection)* untuk mengungkapkan pelanggaran dan menciptakan iklim yang sehat bagi pegawai.

Sistem *whistleblowing* dibentuk oleh Komite Audit perusahaan dan berdasarkan praturan OJK Nomor: IX.1.5 yang mewajibkan Komite Audit untuk menangani pengaduan, dan *Sarbanes-Oxley Act of 2002 Section 310* tentang *Publik Company Audit Committee* yang mengharuskan Komite Audit untuk menerima, menelaah dan menindaklanjuti pengaduan yang berkaitan dengan masalah akuntansi, pengendalian internal, dan auditing, dengan tetap menjaga kerahasiaan identitas pelapor. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mendeteksi, meminimalisir, dan kemudian menghilangkan kecurangan atau penipuan yang dilakukan pihak internal organisasi.

Peran *whistleblower* sebagai salah satu bentuk pengawasan kinerja organisasi. Hal ini dikarenakan *whistleblower* dapat diperankan oleh siapa saja yang mengetahui tindak kecurangan dalam organisasi. Survey yang dilakukan oleh *Institute of Business Ethics* (2007) menyimpulkan bahwa satu di antara empat karyawan mengetahui kejadian pelanggaran, tetapi lebih dari separuh (52%) dari yang mengetahui terjadinya pelanggaran tersebut tetap diam dan tidak berbuat sesuatu. Keengganan untuk melaporkan pelanggaran yang diketahui dapat diatasi melalui penerapan *Whistleblowing* *System* yang efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Jaminan keamanan dan perlindungan hukum terhadap *whistleblower* juga sudah ada sejak tahun 2006 dengan lahirnya UU 13/2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Coram *et al.* (2008) dalam Puspasari (2012) menjelaskan bahwa organisasi yang mempunyai fungsi audit internal organisasi dapat mendeteksi terjadinya Kecurangan Akuntansi di dalam perusahaan secara baik. Pada tahun 1970an Cressey seorang kriminolog dan sosiolog asal Amerika Serikat, menyatakan ada tiga faktor yang menjadi penyebab terjadinya kecurangan akuntansi, yaitu kesempatan, rasionalisasi, dan dorongan/ tekanan. Ketiga faktor tersebut disebut *fraud triangle* (segitiga kecurangan akuntansi). Sama seperti Cressey, Albrecht (1980an) menyatakan tiga faktor penyebab terjadinya *fraud,* yaitu tekanan situasional (*situasional preasure*), kesempatan untuk melakukan *fraud* dan integritas personal. Studi dari Albrecht mengganti faktor rasional dari Cressey menjadi integritas personal (*personal integrity*) agar lebih dapat diobservasi. Mengingat *personal integrity* mengacu kepada kode etik personal yang dimiliki individu.

Moral merupakan hal yang sesuai dengan keyakinan umum yang diterima masyarakat, berkaitan dengan penilaian norma tindakan manusia. Semakin tinggi level penalaran Moral Individu, maka akan semakin cenderung untuk tidak melakukan Kecurangan Akuntansi (Wilopo, 2006 dalam Puspasari, 2012). Berbagai temuan yang telah dipaparkan berdasarkan kasus-kasus Kecurangan Akuntansi di Indoensia menunjukkan bahwa faktor penyebab Kecurangan Akuntansi dapat dibedakan menjadi faktor perusahaan (eksternal) dan faktor dalam diri individu (internal) sebagai pelaku. Beberapa penelitian di bidang etika menggunakan teori perkembangan moral untuk mengobservasi dasar individu melakukan suatu tindakan. Salah satu yang sering digunakan adalah teori mengenai level penalaran moral Kohlberg (Puspasari,2012). Kohlberg (1971) menjelaskan bahwa moral berkembang melalui tiga tahapan, yaitu tahapan *pre-conventional,* tahapan *conventional,* dan tahapan *post-conventional*.

Melihat dari situs wawker.com tahun 2016 menyatakan menurut Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mengungkap data provinsi terkorup di Indonesia adalah Sumatera Selatan di posisi 13 sebesar Rp 56 Miliar. Universitas Negeri terbaik di kota Palembang yaitu Universitas Sriwijaya pernah terjadi tindak korupsi yang dilakukan oleh Ketua Program Pendidikan Dokter Spesialis Kedokteran bernama Prof Dr M. Hatta Ansori yang terjadi tahun 2008. Hal ini menunjukkan korupsi sudah merambat ke perguruan tinggi negeri di Palembang. Penanganan kasus yang berlarut-larut bahkan sering dihentikan inilah muncul kekhawatiran bahwa tindak kecurangan akuntansi (korupsi) akan dapat terjadi lagi, apabila tidak ada tindak pencegahan ataupun moralitas yang rendah dari individu.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian yang berjudul **Pengaruh Persepsi Karyawan Mengenai *Whistleblowing System* dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan *Fraud* pada Universitas Sriwijaya**. Peneliti tertarik menggunakan objek tersebut karena Universitas Sriwijaya merupakan salah satu entitas akuntansi dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban dalam sektor pendidikan.

**1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah dijabarkan, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Persepsi Karyawan Mengenai *Whistleblowing System* dan Moralitas Individu secara parsial terhadap Pencegahan *Fraud?*
2. Bagaimana pengaruh Persepsi Karyawan Mengenai *Whistleblowing System* dan Moralitas Individu secara simultan terhadap Pencegahan *Fraud?*

**1.3 Batasan Masalah**

Salah satu upaya penulis untuk memfokuskan penulisan agar tidak melebar dari hasil yang diharapkan maka penulis melakukan pembatasan. Penelitian ini fokus pada permasalahan pengaruh Persepsi Karyawan Mengenai *Whistleblowing System* dilihat dari 3 aspek dalam sistem *whistleblowing* itu sendiri menurut KNKG (2008) dan Moralitas Individu diukur berdasarkan perkembangan moral menurut Kolhberg. Sedangkan untuk Pencegahan *Fraud* diukur berdasarkan 5 teknik dalam melakukan pencegahan kecurangan menurut K.H Spencer Picket (2001). Sedangkan untuk objek penelitiannya akan dilaksanakan di Universitas Sriwijaya, tepatnya pada pegawai bagian keuangan/ akuntansi karena bagian ini yang mencatat pengeluaran dan pemasukkan di perguruan tinggi negeri ini.

**1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

**1.4.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi tujuan peneltian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Persepsi Karyawan Mengenai *Whistleblowing system* dan Moralitas Individu terhadap Pencegahan *Fraud* secara parsial
2. Untuk mengetahui pengaruh Persepsi Karyawan Mengenai *Whistleblowing System* dan Moralitas Individu terhadap Pencegahan *Fraud* secara simultan

**1.4.2 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang didapatkan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Praktis
	1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dalam perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai kondisi yang berpengaruh terhadap Pengendalian Internal dan Moralitas Individu dalam suatu organisasi untuk melakukan tindakan Kecurangan Akuntansi.

* 1. Bagi Lembaga Pendidikan

Sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan dalam merancang sistem Pengendalian Internal khususnya bagi lembaga pendidikan dengan lebih baik, dan mendukung karyawan membentuk Moralitas Individu yang lebih baik.

* 1. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan pengetahuan tambahan mengenai Pengendalian Internal dan Moralitas Individu mempengaruhi Kecurangan Akuntansi

1. Manfaat Teoritis
	1. Bagi Universitas Sriwijaya dan Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan bacaan yang dapat bermanfaat sebagai informasi dan pengetahuan bagi rekan-rekan mahasiswa ataupun pihak umum, serta menambah refrensi perpustakaan yang dapat dijadikan sebagai wacana baru yang dapat menambah wawasan.

* 1. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan informasi serta sebagai bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya.

**1.5 Sistematika Penulisan**

Untuk membuat laporan ini lebih terarah, maka secara garis besar penelitian ini terdiri dari lima bab dan tiap-tiap bab memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya. Berikut ini uraian singkat mengenai sistematika penulisan penelitian ini:

**BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini penulis akan mengemukakan dasar permasalahan yang akan dibahas, dengan urutan yaitu : Latar belakang masalah, perumusan masalah, ruang lingkup pembahasan, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

 Pada bab ini penulis akan mengemukakan landasan teori dan literatur-literatur yang digunakan sebagai acuan perbandingan untuk membahas masalah pengaruh persepsi karyawan mengenai *whistleblowing system* dan moralitas individu terhadap pencegahan *fraud* pada Universitas Sriwijaya.

**BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Pada bab ini, penulis akan menyajikan data berupa sampel yang digunakan dalam penelitian dan informasi data-data yang diperlukan dalam melakukan pengujian penelitian ini meliputi jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, variabel penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data

**BAB IV PEMBAHASAN**

Pada bab ini akan dilakukan pembahasan dan analisis data berdasarkan metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis sederhana, dimana sebelum melakukan analisis sederhana terlebih dahulu dilakukan uji normalitas data dan uji asumsi klasik.

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari hasil dan pembahasan yang telah dilakukan. Dalam bab ini juga akan diberikan saran-saran yang diharapkan bermanfaat dalam pemecahan masalah dan penelitian yang akan datang.